

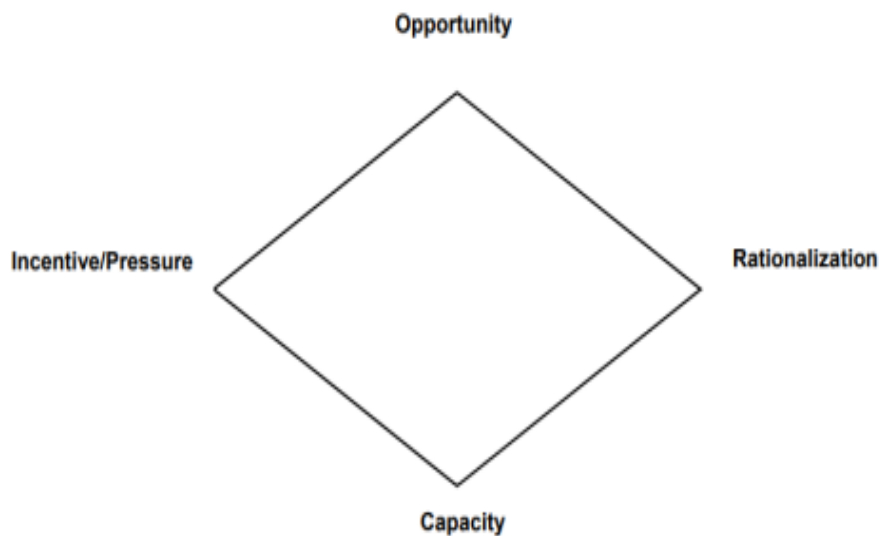
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Fraud Diamond Theory*

Fraud Diamond Theory adalah pandangan baru terhadap fenomena *fraud* yang diusulkan oleh (Wolfe & Hermanson, 2004). Teori ini adalah bentuk pembaruan dari Teori *Fraud Triangle* oleh Cressey (1953) yang menambahkan elemen *capacitiy* yang diyakini memiliki hubungan signifikan dengan tindakan *fraud*. Jika dalam Teori *Fraud Triangle* (Cressey, 1953) Tuanakotta (2012) menjelaskan bahwa terdapat tiga elemen yaitu *incentive/pressure* (tekanan), *opportunity* (peluang), dan *rasionalization* (rasionalisasi). Ketiga elemen tersebut dalam teori *fraud diamond* mengalami penambahan elemen yaitu *capability/capacity* (kemampuan), sebagaimana tersaji pada Gambar 2.1



Sumber: Wolfe & Hermanson (2004), 2022

Gambar 2.1
Elemen *Fraud Diamond*

Elemen *Fraud Diamond* (Wolfe & Hermanson, 2004) meliputi:

1. *Pressure* atau tekanan.
2. *Oppurtunity* atau peluang.
3. *Rationalization* atau rasionalisasi.
4. *Capability* atau kemampuan.

Pressure atau tekanan dapat didefinisikan sebagai motif dari perilaku seseorang untuk melakukan penyelewengan karena dipicu oleh adanya dorongan yang dirasakan (Arles, 2014). Setiap pelaku harus menghadapi beberapa jenis tekanan untuk dapat melakukan penipuan. Tekanan yang dirasakan diartikan sebagai motivasi yang menuntun pelaku untuk terlibat dalam perilaku yang tidak etis. Tekanan semacam ini dapat terjadi pada semua pihak di semua tingkatan organisasi dan dapat terjadi karena berbagai alasan (Ruankaew, 2016). Alasannya dapat berupa adanya tekanan finansial, tekanan karena adanya dorongan dari kebiasaan yang buruk dan tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan (Wijayani, 2016). *Oppurtunity* atau kesempatan dalam kaitannya dengan *fraud* diartikan sebagai suatu keadaan yang memungkinkan seseorang untuk dapat melakukan tindakan yang tidak dibenarkan seperti tindakan penyelewengan (Arles, 2014). Peluang bisa terjadi karena dipengaruhi oleh lemahnya pengendalian internal, pengawasan yang kurang terkontrol, atau karena posisi yang strategis. *Rationalization* atau rasionalisasi menunjukkan bahwa pelaku harus bisa merumuskan beberapa bentuk rasionalisasi yang dapat diterima secara moral sebelum terlibat dalam perilaku yang tidak etis (Abdullahi *et al.*, 2015). Rasionalisasi memungkinkan penipu memandang tindakan ilegalnya sebagai suatu tindakan yang dapat diterima. Alasan seperti tergoda untuk melakukan *fraud* karena merasa rekan kerjanya juga melakukan hal yang sama dan tidak menerima sanksi atas tindakan *fraud* tersebut bisa menjadi pembenaran dari penyelewengan yang terjadi (Zulaikha & Hadiprajitno, 2016). Pada akhirnya, tindakan rasionalisasi ini hanya akan menghasilkan pemakluman dari tindakan *fraud* yang telah terjadi, apalagi jika tindakan *fraud* dilakukan secara terus-menerus. *Capability* atau kemampuan diartikan sebagai suatu kemampuan atau kelebihan seseorang dalam memanfaatkan keadaan yang melingkupinya, yang mana kemampuan ini lebih banyak diarahkan pada situasi untuk mengelabui sistem pengendalian internal dengan tujuan untuk melegalkan hal-hal yang sebenarnya dilarang dalam suatu organisasi (Arles, 2014). Dimana harus memiliki kemampuan untuk melihat celah untuk melakukan *fraud* sebagai peluang dan mengambil keuntungan.

Kaitan antara teori *fraud diamond* dengan penelitian ini yaitu adanya motif seseorang untuk melakukan suatu tindakan kecurangan. Implikasinya adalah tentang bagaimana *pressure* atau tekanan dapat memotivasi seseorang untuk bertindak curang. Tekanan ini bisa berasal dari atasan seperti adanya kewajiban upeti, menyetor sejumlah dana kepada pimpinan atau instansi lain yang terkait sebagai balas jasa karena telah memperjuangkan anggaran dari suatu proyek pekerjaan. *Opportunity* (kesempatan atau peluang) berkaitan dengan lemahnya sistem pengendalian internal pemerintah atau tidak berjalan sebagaimana mestinya. Rasionalisasi (*rationalization*) akan berdampak pada pemikiran bahwa tindakan *fraud* yang dilakukan merupakan tindakan yang sudah umum dilakukan oleh kebanyakan orang. Pegawai yang melakukan kecurangan secara rasional merasa bahwa tindakan penyelewengan adalah hal yang lumrah terjadi, seperti pembenaran bahwa nilai yang dikorupsi masih dalam jumlah yang sedikit sehingga kekurangannya tidak akan begitu jelas terlihat. Sementara untuk *Capability* atau kemampuan berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melihat celah tentang kapan dan bagaimana pelaku melakukan kecurangan. Seseorang dengan posisi yang rendah, meskipun menyadari adanya kesempatan melakukan korupsi, tetap tidak dapat melakukannya jika terus ada dalam pengawasan atasan yang jujur. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin tinggi kemampuannya melihat dan memanfaatkan kesempatan untuk melakukan korupsi. Keempat elemen dari *Fraud Diamond Theory* tentu bisa menjadi alasan penyebab pegawai melakukan tindakan *fraud*.

2.1.2 Fraud (Kecurangan)

Fraud menurut *The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan tertentu seperti manipulasi, memberikan laporan yang keliru atau bentuk perbuatan lain yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu baik dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau kelompok tertentu yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat merugikan pihak lain. *Fraud* merupakan istilah hukum yang diserap ke dalam disiplin ilmu akuntansi, dan menjadi bagian penting dalam kosa kata akuntansi

forensik. *Fraud* jika diartikan secara harfiah, artinya adalah kecurangan. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, internal *fraud* merupakan tindakan penyelewengan di dalam organisasi atau instansi.

2.1.2.1 *Fraud* terhadap Laporan Keuangan (*Financial Statements Fraud*)

Jenis *fraud* ini sangat dikenal para auditor yang melakukan general audit. *Fraud* ini berupa salah saji baik itu *overstatement* maupun *understatement*. *Fraudulent Statement* meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu organisasi atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing*. Contoh *fraud* terhadap laporan keuangan:

1. Memalsukan bukti transaksi.
2. Mengakui suatu transaksi lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya.
3. Menerapkan metode akuntansi tertentu secara tidak konsisten.
4. Menerapkan metode pengakuan aset sedemikian rupa sehingga aset menjadi nampak lebih besar dibandingkan yang seharusnya.
5. Menerapkan metode pengakuan liabilitas sedemikian rupa sehingga liabilitas menjadi nampak lebih kecil dibandingkan yang seharusnya.

2.1.2.2 *Fraud* Terhadap Aset (*Asset Misappropriation*)

Kecurangan terhadap aset adalah penyalahgunaan aset instansi (institusi), baik itu dicuri atau digunakan untuk keperluan pribadi tanpa izin dari instansi atau organisasi. Aset instansi dapat berbentuk kas (uang tunai) dan non-kas. *Asset misappropriation* dikelompokkan menjadi dua macam:

1. *Cash Misappropriation* yaitu Penyelewengan terhadap aset yang berupa kas (Misalnya: penggelapan kas, menahan cek pembayaran untuk vendor).
2. *Non Cash Misappropriation* yaitu Penyelewengan terhadap aset yang berupa non-kas (misalnya: menggunakan fasilitas instansi untuk pribadi).

2.1.2.3 Korupsi (*Corruption*)

Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *Corruptio-Corumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan atau menyogok. Korupsi (*Corruption*) terbagi ke dalam pertentangan kepentingan (*conflict of interest*),

suap (*bribery*), pemberian ilegal (*illegal gratuity*), dan pemerasan (*economic extortion*). *Fraud* jenis ini bersifat *simbiosis mutualisme* sehingga seringkali tidak dapat dideteksi karena pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan. Jenis kecurangan (*fraud*) menurut *Association of Certified Fraud Examiners* atau *ACFE* antara lain kesalahan pencatatan laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi. Dari ketiga jenis kecurangan (*fraud*) tersebut, jenis *fraud* yang sering terjadi di sektor pemerintahan adalah korupsi. Hal tersebut sesuai hasil survei *Corruption Perception Index* (CPI) yang dilakukan terhadap 183 negara di dunia, Indonesia berada pada peringkat 96 dari 180 negara dengan skor 38. Secara umum korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan pemilik untuk kepentingan pribadi. Korupsi pada level pemerintahan daerah adalah dari sisi penerimaan, pemerasan uang suap, pemberian perlindungan, pencurian barang-barang publik untuk kepentingan pribadi (Adinda, 2015). Menurut *Transparency International* korupsi adalah perilaku pejabat publik maupun politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Korupsi (Republik Indonesia, 1999) dan (Republik Indonesia, 2001) mencakup perbuatan melawan hukum, memperkaya diri, yang merugikan keuangan/perekonomian negara (pasal 2), menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara (pasal 3), termasuk juga penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, gratifikasi. Menurut Sahetapy (2013) korupsi sudah mewabah di Indonesia, merajalela di hampir seluruh instansi publik, seluruh tingkatan di pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Kasus korupsi di instansi pemerintah tidak hanya melibatkan orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi, tetapi juga orang-orang yang berada di bawahnya, baik di pemerintah pusat maupun daerah. Tindak korupsi yang sering dilakukan antara lain penyuapan, manipulasi laporan keuangan, penghilangan/perusakan bukti dokumen, dan *mark-up* yang merugikan keuangan negara.

2.1.3 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Dalam suatu entitas atau organisasi diperlukan adanya suatu sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian internal pemerintah sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan operasional pemerintah, karena dengan adanya sistem pengendalian internal maka kecurangan (*fraud*) yang mungkin dilakukan pegawai dapat di minimalisir. Oleh karena itu, setiap entitas pemerintah membuat dan menjalankan sistem pengendalian internal demi kelancaran dan kemajuan untuk mencapai tujuan organisasi. Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Substansi yang mendasar dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 ini adalah terwujudnya suatu sistem pengendalian intern pada pemerintah yang dapat mewujudkan suatu praktik-praktik yang baik dalam tata kelola (*good governance*) pada sektor publik. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah adalah proses yang dirancang oleh manajemen untuk memberikan keyakinan atau jaminan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan peraturan perundang-undangan sehingga tujuan organisasi pemerintah dapat tercapai dan kerugian atau kemungkinan ancaman keamanan dalam informasi dapat dikurangi. Sistem pengendalian intern yang lemah akan memberikan kesempatan bagi pegawai untuk melakukan kecurangan (Phadilah & Burhany, 2020). Sebaliknya dengan adanya sistem pengendalian intern yang baik akan mempersempit atau mengurangi peluang dan kesempatan yang ada untuk melakukan *fraud*. Oleh karena itu setiap entitas pemerintah membuat dan menjalankan sistem pengendalian internal demi kelancaran dan kemajuan organisasi.

Menurut Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008 tujuan sistem pengendalian internal pemerintah adalah memberikan keyakinan yang memadai tentang:

1. Kegiatan yang efektif dan efisien .
2. Laporan keuangan yang dapat diandalkan.
3. Pengamanan aset Negara.
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan tersebut mengisyaratkan bahwa jika dilaksanakan dengan baik dan benar, sistem pengendalian internal pemerintah akan memberi jaminan dimana seluruh penyelenggaraan negara, mulai dari pimpinan hingga pegawai di instansi akan melaksanakan tugasnya dengan jujur dan taat pada peraturan. Untuk mencapai tujuannya terdapat unsur-unsur dari sistem pengendalian internal pemerintah yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Akibat dari tujuan sistem pengendalian internal pemerintah akan memberikan manfaat yaitu mendeteksi kesalahan dan *fraud* dalam pelaksanaan aktivitas organisasi dan membantu pengamanan aset terkait dari kemungkinan terjadinya kecurangan, pemborosan dan salah penggunaan yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi.

Kerangka pengendalian internal menurut *Committee of Sponsoring Organization Of The Treadway Commission (COSO)* tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*) merupakan tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap pimpinan instansi atau lembaga tentang pengendalian intern yang dapat menimbulkan kesadaran seluruh pegawai mengenai pentingnya pengendalian bagi instansi atau lembaga.
2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*). Hal pertama yang dilakukan berkaitan dengan pengendalian internal dalam sub ini yaitu melihat kesesuaian antara tujuan kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan sasarannya, serta kesesuaian dengan tujuan strategi yang ditetapkan. Setelah penetapan tujuan telah dilaksanakan, tahap selanjutnya adalah melakukan identifikasi risiko intern dan ekstern yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, kemudian menganalisis risiko yang mungkin terjadi serta dampak yang mungkin ditimbulkan mulai dari yang tertinggi sampai dengan risiko yang sangat rendah.

3. Kegiatan Pengendalian (*Activity Control*) adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.
4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*). Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.
5. Pemantauan (*Monitoring*). Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review lainnya dapat segera ditindak lanjuti.

2.1.4 Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi merupakan rasa identifikasi kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi dan loyalitas keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi yang bersangkutan yang dinyatakan oleh seseorang pegawai terhadap organisasinya. Komitmen organisasi didefinisikan sebagai keinginan kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi, keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi dan keyakinan tertentu, dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi (Luthans, 2008). Komitmen organisasi meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan organisasi demi pencapaian tujuan. Hal lain dikemukakan oleh (Pramuditha, 2013) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi merupakan unsur loyalitas terhadap organisasi, keterlibatan dalam pekerjaan, dan identifikasi terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi adalah kemampuan pada karyawan dalam mengidentifikasi dirinya dengan nilai-nilai, aturan-aturan, tujuan organisasi atau instansi mencakup unsur kesetiaan atau loyalitas individu terhadap organisasi. Komitmen pada organisasi tidak hanya menyangkut pada kesetiaan pegawai dan pada organisasi yang bersifat positif tetapi juga melibatkan hubungan yang aktif dengan organisasi, dimana pegawai bersedia atas kemauan sendiri untuk memberikan segala sesuatu yang ada pada dirinya guna membantu merealisasikan tujuan dan kelangsungan organisasi. Komitmen organisasi mengarahkan seorang individu

dalam melakukan berbagai tindakan. Apabila seorang pegawai mempunyai rasa memiliki dan dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan di organisasinya maka akan dapat menurunkan tingkat terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*).

Terdapat tiga dimensi komitmen organisasi (Luthans, 2008):

1. Komitmen kontinyu (*continuance commitment*) merupakan komitmen yang berkaitan dengan investasi pegawai kepada organisasi dan persepsi pegawai tentang kerugian akan dihadapinya jika ia meninggalkan organisasi. Pegawai tetap bertahan pada suatu organisasi karena membutuhkan gaji dan keuntungan-keuntungan lain, atau karena pegawai tersebut tidak menemukan pekerjaan lain. Dengan kata lain, pegawai tersebut tinggal di organisasi itu karena dia membutuhkan organisasi tersebut.
2. Komitmen efektif (*affective commitment*) merupakan komitmen yang berkaitan dengan keterkaitan identitas, nilai-nilai bersama dan keterlibatan pribadi. Dan dapat terjadi apabila pegawai ingin menjadi bagian dari organisasi karena adanya ikatan emosional (*emotional attachment*) atau psikologis terhadap organisasi. Keterikatan individu secara emosional terhadap organisasi, pengidentifikasian individu terhadap organisasi dan keterlibatan individu dalam organisasi. Komitmen ini didasarkan atas rasa senang suatu individu terhadap organisasi sehingga dengan sukarela dan tanpa rasa terpaksa individu tersebut akan tetap mempertahankannya dalam organisasi. Individu tetap akan setia kepada organisasinya meskipun organisasi sedang dalam kesulitan.
3. Komitmen normatif (*normative commitment*) dapat diartikan suatu tindakan yang berkaitan dengan internalisasi norma organisasi, loyalitas, manfaat dan kewajiban terhadap organisasi yang timbul dari nilai-nilai diri pegawai. Pegawai bertahan menjadi anggota suatu organisasi karena memiliki kesadaran bahwa komitmen terhadap organisasi merupakan hal yang memang seharusnya dilakukan.

Komitmen pegawai terhadap suatu organisasi terjadi dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Ada tiga faktor yang mempengaruhi komitmen pegawai terhadap suatu instansi (Steers, 2011) yaitu:

1. Ciri pribadi kinerja, termasuk masa jabatannya dalam organisasi dan variasi kebutuhan dan keinginan yang berbeda dari tiap pegawai.
2. Ciri pekerjaan, seperti identitas tugas dan kesempatan berinteraksi dengan rekan kerja dalam organisasi tersebut.
3. Pengalaman kerja, seperti keandalan pengalaman organisasi dimasa lampau dan bagaimana cara pegawai menginterpretasikan cara pegawai bekerja dalam suatu organisasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi merupakan suatu pembedaan sikap mental individu yang berkaitan dengan tingkat loyalitasnya terhadap organisasi maupun instansi tempat individu tersebut bekerja serta mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi dan memberikan kontribusi yang besar dalam mencapai terwujudnya tujuan organisasi. Pegawai yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan menaati aturan-aturan yang ada dalam instansi sehingga akan dapat menurunkan tingkat terjadinya kecurangan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai landasan dan referensi dalam menyusun sebuah kerangka pikir ataupun arah dari penelitian ini. Penelitian terdahulu terkait tema penelitian ini dibuat dalam bentuk Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Padhilah & Burhany (2020)	Faktor-faktor yang mempengaruhi <i>fraud</i> . (Studi kasus pada Pemerintah Daerah Bandung Barat)	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X_1) Penegakan Peraturan (X_2) Kesesuaian Kompensasi (X_3) <i>Fraud</i> (Y)	1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> . 2. Penegakan Peraturan tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> . 3. Kesesuaian Kompensasi berpengaruh negatif terhadap <i>fraud</i> .

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
2	Febriani & Suryandari, (2019) Jurnal Akuntansi Vol. 9, No.1 2019	Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan (<i>Fraud</i>) Persepsi Pegawai Pada Dinas Kota Tegal	Keefektifan Pengendalian Internal (X_1) Penegakan Peraturan (X_2) Kesesuaian Kompensasi (X_3) Komitmen organisasi (X_4) Kecenderungan Kecurangan (<i>Fraud</i>) (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keefektifan Pengendalian Internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (<i>fraud</i>). 2. Penegakan Peraturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (<i>fraud</i>). 3. Kesesuaian Kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (<i>fraud</i>). 4. Komitmen Organisasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (<i>fraud</i>).
3	Kurrohman <i>et al</i> (2017) <i>Internatinal Journal of Economis and Manage-ment</i>	<i>Determinant of Fraudulent inGovernment :An Empirical Analysis in Situbondo Regency, East Java, Indonesia</i>	<i>Compliance Compensation (X_1) Procedural Fairness (X_2) Law Enforcement (X_3) Effectiveness Of Internal Control (X_4)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Compliance Compensation had no effect on fraud in the government sector.</i> 2. <i>Procedural fairness had a negative effect on fraud in the government</i>

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			<i>Ethical Organizational Culture (X₅)</i> <i>Organizational Commitment (X₆)</i> <i>Fraud (Y)</i>	<i>sector.</i> 3. <i>Law enforcement had no effect on fraud in the government sector.</i> 4. <i>Effectiveness of internal control had no effect on fraud in the government sector.</i> 5. <i>Ethical organizational culture had a negative effect on fraud in the government sector.</i> 6. <i>Organizational commitment had a negative effect on fraud in the government sector.</i>
4.	Dewi & Muslimin (2021)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecurangan (<i>Fraud</i>) Pada Sektor Pemerintahan	Penegakan Hukum (X ₁) Efektivitas Pengendalian Intern (X ₂) Kesesuaian Kompensasi (X ₃) <i>Fraud (Y)</i>	1. Penegakan Hukum berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>fraud</i> di sektor pemerintahan. 2. Efektivitas Pengendalian Intern berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>fraud</i> di sektor

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>pemerintahan.</p> <p>3. Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>fraud</i> di sektor pemerintahan.</p>
5.	Simbolon, David (2017)	<p>Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi <i>Fraud</i> di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Dairi</p>	<p>Gaya Kepemimpinan (X_1) Kesesuaian Kompensasi (X_2) Sistem Pengendalian Internal (X_3) Penegakan Peraturan (X_4) Budaya Etis Organisasi (X_5) Komitmen Organisasi (X_6) <i>Fraud</i> (Y)</p>	<p>1. Gaya Kepemimpinan berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>fraud</i> di sektor pemerintahan.</p> <p>2. Kesesuaian Kompensasi berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>fraud</i> di sektor pemerintahan.</p> <p>3. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>fraud</i> di sektor pemerintahan.</p> <p>4. Penegakan Peraturan berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>fraud</i> di sektor pemerintahan.</p>

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				5. Budaya Etis Organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>fraud</i> di sektor pemerintahan. 6. Komitmen Organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>fraud</i> di sektor pemerintahan.
6.	Wulandari & Widodo (2020)	Faktor-faktor yang mempengaruhi <i>fraud</i> : Studi pada pemerintah desa di Kabupaten Bantul	Pengendalian Internal (X_1) Asimetri Informasi (X_2) Ketaatan Aturan Akuntansi (X_3) Perilaku Tidak Etis (X_4) <i>Fraud</i> (Y)	1. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh negatif terhadap <i>fraud</i> di lingkungan pemerintahan. 2. Asimetri Informasi tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> di lingkungan pemerintahan. 3. Ketaatan Aturan Akuntansi tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> di lingkungan pemerintahan. 4. Perilaku Tidak Etis berpengaruh positif

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				terhadap <i>fraud</i> di lingkungan pemerintahan.
7.	Sudarmawanti <i>et al</i> (2022)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecurangan (<i>Fraud</i>) untuk Mewujudkan <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i>	Keadilan Organisasi (X_1) Kepatuhan Sistem pengendalian Internal (X_2) Komitmen organisasi (X_3) <i>Fraud (Y)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keadilan organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan (<i>fraud</i>) di sektor pemerintahan. 2. Kepatuhan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh negatif terhadap kecurangan (<i>fraud</i>) di sektor pemerintahan. 3. Komitmen Organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan (<i>fraud</i>) di sektor pemerintahan.
8.	Usman (2017)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya <i>Fraud</i> di Sektor Pemerintahan (Studi Pada SKPD Kabupaten Lawu Timur)	Kesesuaian Kompensasi (X_1) Penegakan Hukum (X_2) Komitmen Organisasi (X_3) <i>Fraud (Y)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian Kompensasi tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> di sektor pemerintahan. 2. Penegakan Hukum berpengaruh negatif

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>terhadap <i>fraud</i> di sektor pemerintahan.</p> <p>3. Komitmen Organisasi berpengaruh negatif terhadap <i>fraud</i> di sektor pemerintahan.</p>
9.	Adinda (2015)	Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan (<i>Fraud</i>) di Sektor Pemerintahan Kabupaten Klaten	Keefektifan Pengendalian Internal (X_1) Kultur Organisasi (X_2) Kesesuaian Kompensasi (X_3) Penegakan Peraturan (X_4) Keadilan Distributif (X_5) Keadilan Prosedural (X_6) Komitmen Organisasi (X_7) <i>Fraud</i> (Y)	<p>1. Keefektifan Pengendalian Internal berpengaruh negatif terhadap <i>fraud</i> di sektor pemerintahan.</p> <p>2. Kultur Organisasi berpengaruh negatif terhadap <i>fraud</i> di sektor pemerintahan.</p> <p>3. Kesesuaian Kompensasi tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> di sektor pemerintahan.</p> <p>4. Penegakan Peraturan tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> di sektor pemerintahan.</p> <p>5. Keadilan Distributif berpengaruh positif terhadap <i>fraud</i> di sektor pemerintahan.</p>

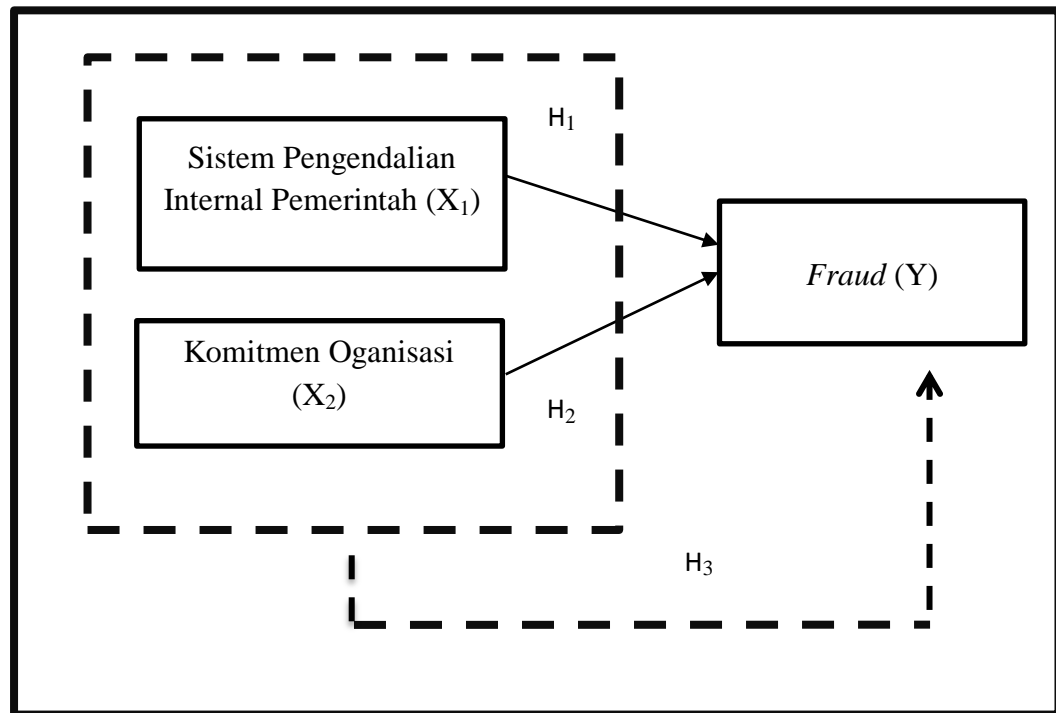
No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>6. Keadilan Prosedural berpengaruh negatif terhadap <i>fraud</i> di sektor pemerintahan.</p> <p>7. Komitmen Organisasi berpengaruh negatif terhadap <i>fraud</i> di sektor pemerintahan.</p>
10.	Mustikasari (2013)	Persepsi Pegawai Dinas Se-Kabupaten Batang Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecurangan	Penegakan Hukum (X ₁) Keefektifan Pengendalian Internal (X ₂) Asimetri Informasi (X ₃) Kesesuaian Kompensasi (X ₄) Keadilan Prosedural (X ₅) Budaya Etis Manajemen (X ₆) Komitmen Organisasi (X ₇) <i>Fraud</i> (Y)	<p>1. Penegakan Hukum berpengaruh negatif terhadap <i>fraud</i> di sektor pemerintahan.</p> <p>2. Keefektifan Pengendalian Internal berpengaruh negatif terhadap <i>fraud</i> di sektor pemerintahan.</p> <p>3. Asimetri Informasi berpengaruh positif terhadap <i>fraud</i> di sektor pemerintahan.</p> <p>4. Kesesuaian Kompensasi berpengaruh negatif terhadap <i>fraud</i> di sektor pemerintahan.</p> <p>5. Keadilan Prosedural</p>

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> di sektor pemerintahan.</p> <p>6. Budaya Etis Manajemen berpengaruh negatif terhadap <i>fraud</i> di sektor pemerintahan.</p> <p>7. Komitmen Organisasi berpengaruh negatif terhadap <i>fraud</i> di sektor pemerintahan.</p>

Sumber : Berbagai Referensi,2022

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran (Sekaran & Bougie, 2016) merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting. Berdasarkan uraian dari tinjauan pustaka di atas, kerangka pemikiran dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hubungan antara variabel terikat yaitu *fraud* dengan variabel bebas yaitu sistem pengendalian internal pemerintah dan komitmen organisasi. Hubungan variabel dalam penelitian ini diilustrasikan melalui kerangka konseptual, yang digunakan untuk merumuskan hipotesis dalam penelitian pada Gambar 2.2.



Sumber : *Data diolah, 2022*

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

Keterangan :

—————> : Pengaruh Parsial

- - - - - : Pengaruh Simultan

X : Variabel Independen

Y : Variabel Dependen

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2019). Hipotesis yang akan diajukan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap *Fraud*

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan komponen penting dalam manajemen dinas pemerintahan dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional yang sehat dan aman. Sistem Pengendalian Internal yang baik dapat membantu pemerintah dalam menjaga aset, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek ke hati-hatian. Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara sistem pengendalian internal terhadap *fraud* di sektor pemerintahan (Wulandari & Widodo, 2020). Hal tersebut membuktikan bahwa sistem pengendalian internal yang baik dan efektif dapat mengurangi atau bahkan menutup peluang untuk melakukan kecurangan. Sistem Pengendalian Internal yang buruk akan memberikan peluang untuk pegawai dalam melakukan *fraud*, hal tersebut sejalan dengan *fraud diamond theory* yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal yang lemah merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan *fraud* meningkat. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

H₁: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh negatif terhadap *fraud*.

2.4.2 Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap *Fraud*

Komitmen organisasi merupakan bentuk kesetiaan atau loyalitas yang dimiliki pegawai terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Komitmen organisasi mengarahkan seorang individu dalam melakukan berbagai tindakan (Adi *et al.*, 2016). Seorang pegawai apabila mempersepsikan tingkat komitmen atau loyalitas yang dimilikinya tinggi terhadap suatu organisasi namun hal tersebut tidak berpengaruh dengan keadaan dan kondisi organisasi atau tidak diapresiasi oleh organisasi, maka seorang pegawai akan menganggap wajar jika pegawai tersebut tidak peduli terhadap organisasinya. Hal ini berkaitan dengan *fraud diamond theory*, dimana terdapat rasionalisasi bagi pegawai terhadap

tingkat komitmen organisasi yang rendah sehingga dapat menjadi faktor untuk melakukan tindak kecurangan. Komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan (Adinda, 2015) dan (Kurrohman *et al*, 2017). Hal ini berarti bahwa pegawai cenderung berkomitmen pada organisasi yang bisa menurunkan kemungkinan tindakan kecurangan yang akan terjadi.

H₂: Komitmen organisasi berpengaruh terhadap *fraud*.

2.4.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah & Komitmen Organisasi terhadap *Fraud*.

Sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *fraud* (Simbolon, 2017) dan (Mustikasari, 2013). Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik sistem pengendalian internal pemerintah dan semakin tinggi komitmen yang dimiliki pegawai suatu organisasi maka dapat menurunkan kemungkinan terjadinya *fraud*. Sistem Pengendalian Internal yang buruk akan memberikan peluang untuk pegawai dalam melakukan *fraud*. Hal ini berkaitan dengan *fraud diamond theory*, dimana terdapat peluang akibat sistem pengendalian internal yang lemah dan rasionalisasi bagi pegawai terhadap tingkat komitmen organisasi yang rendah sehingga dapat menjadi faktor untuk melakukan tindak kecurangan. Maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₃: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Komitmen Organisasi secara bersama – sama berpengaruh terhadap *Fraud*.